

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI**

(Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra)

**Yuliana**

**(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung)**

Email: [yuliana@prasetiemandiri.co.id](mailto:yuliana@prasetiemandiri.co.id)

**Abstract**

*This study aimed to examine the effect of revenue and capital expenditure on economic growth, studies on district / city on the island of Sumatra. The independent variables were the PAD and Capital Expenditures. While the dependent variable is economic growth. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) and district / city on the island of Sumatra from 130 population and that meet the criteria of 30 samples. Based on the research results, it was concluded that 1) Revenue positive effect on Economic Growth 2) Capital Expenditures positive effect on economic growth.*

*Keywords: Revenue, Capital Expenditures, Economic Growth.*

**1. Latar Belakang**

Dengan di berlakukannya Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah dirubah menjadi UU No.32/2004 dan UU N0.33/2004. Pemberlakuan kedua undang – undang tersebut maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya masing- masing.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan tersebut diperlukan pendanaan. Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraanyang terukur, rasional, serta memiliki kepastiandasar hukum penerimaanya.

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan azas desentralisasi. Pembangunan bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan kemampuan didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tugas pokok dan fungsi unit kerja sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja (Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2011).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah daerah mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan dalam hal pendapatan daerah, sehingga mereka harus mendapat dukungan sumber keuangan diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah yang meningkat merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat. Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun yang berubah – ubah sebagai mana tergambar dalam PDRB Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra periode 2007 -2011. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu variabel yang signifikan adalah belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat maupun dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba daerah dan lain lain pendapatan yang sah. Regulasi undang-undang No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah (RUU PDRD) menjadi

Undang-undang . Pengesahan pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan kebijakan yang cukup fundamental dalam hal penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan mulai berlaku pada tanggal 01 januari 2010. Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 diantaranya menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan pajakdaerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telahdibatalkan dan/ jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra tahun 2007- 2010.

Selain Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi belanja modal juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ( teori ekonomi klasik Adam Smith ), yang menyatakan bahwa belanjamodal dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Untukmenggambarkan bagaimana Pemerintah mengalokasikan Belanja Modal secara optimal dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap realisasi pendapatan padaKabupaten/Kota di Pulau Sumatra tahun 2007-2010.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur serta perbandingan untuk melakukan melakukan penelitian dimasa yang akan datang serta memberi informasi khususnya pembuat kebijakan dalam proses penyusunan anggaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya, Adi(2006), membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, belanja pembangunan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. PAD yang berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Simanjuntak (2007), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik pertumbuhan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Hamzah(2007), membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran sedangkan belanja modal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2. Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis**

### **2.1 Pertumbuhan ekonomi**

Menurut Boediono(1988), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah. Menurut konsep teori ekonomi untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

### **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Permendagri N0.37 Tahun 2010 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan.

### **2.3 Belanja Modal**

Abdullah dan Halim (2008), belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal;

- (1) Belanja tanah, merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sampai tanah tersebut siap digunakan.
- (2) Belanja peralatan dan mesin, adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih dari satu tahun.

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.
- (4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.
- (5) Belanja aset tetap lainnya, pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku serta jurnal ilmiah.

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Sumber Pendapatan daerah terdiri atas :

**a. Pendapatan Asli Daerah meliputi :**

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

**b. Dana Perimbangan**

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi . Dana perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.

**c. Lain-lain PAD yang sah**

Adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan

dan kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/ krisis solvability. merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat adalah bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

## **2.5 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah Pajak yang diterima pemerintah daerah dari berbagai pajak yang dibayar dari masyarakat yang digunakan atau berfungsi sebagai pembangunan daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ( Undang- undang No. 28 tahun 2009 ). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009)

## **2.6 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. *Retribusi Tera/Tera Ulang*

Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. *Retribusi Pelayanan Pendidikan* Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. *Retribusi Izin Usaha Perikanan* Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

## **2.7. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang dipisahkan.**

Penerimaan PAD lainnya yang berperan penting selain pajak dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Jenis

pendapatan yang termasuk hasil –hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, yaitu laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

### **2.8. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Adalah Hasil usaha daerah lain dan sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaann daerah (BUMD). Lain-lain Pendapatan Asli Dearah yang sah, antaranya hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

### **2.9. Rumusan Hipotesis**

Berdasarkan kajian pustaka serta penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- (1). PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi
- (2). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## **3. Metodologi Penelitian**

### **3.1. Identifikasi Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1). Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah PDRB (Y).
- (2). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (X1) dan Belanja Modal (X2).

### **3.2. Definisi Operasioanal Variabel**

- (1). Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) merupakan PDRB Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra dalam kurun waktu empat (4) tahun dari 2007 sampai dengan 2011.
- (2). Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya
- (3). Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah



### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sifatnya adalah data kuantitatif yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. Sedangkan menurut sumbernya menggunakan data sekunder yang merupakan data *time series*.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan mencatat langsung dari sumbernya sesuai dengan data yang diperlukan yang diambil dari dokumen yang telah diterbitkan dan dipublikasikan oleh instansi terkait.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :  $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$ .

Keterangan :

Y	= pertumbuhan ekonomi
X <sub>1</sub>	= Pendapatan asli daerah
X <sub>2</sub>	= Belanja modal
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1$ dan $\beta_2$	= Koefisien regresi
$\epsilon$	= Random error term/variabel pengganggu

Agar model regresi efisien dalam dugaan, maka sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi tidak adanya multikolinearitas digunakan nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Bila nilai VIF lebih kecil daripada 10, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan nilai Durbin-Watson (d). Bila nilainya mendekati 2, tidak ada indikasi terjadi autokorelasi, sedangkan untuk mendeteksi tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot (Ghozali, 2006). Untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara serempak digunakan uji F dan untuk menguji secara parsial digunakan uji t.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi apabila dilihat dari nilai maksimum dan minimum serta nilai rata-rata pada periode 2008 – 2011, adalah : rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 301,87 % dengan jumlah pertumbuhan ekonomi minimum sebesar 0,30 % merupakan nilai minimum yang dicapai pada Kabupaten Bireuen. PDRB maksimum sebesar 4,32 % dihasilkan Kabupaten Pesisir Selatan dengan deviasi standar 70,33 % dari rata-rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka dapat memberikan gambaran bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah telah dicapai.

### **4.2. Pendapatan Asli Daerah**

Rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra sebesar 358,7 % dengan jumlah terendah sebesar 1,23% merupakan nilai minimum kabupaten Lampung Tengah sedangkan tertinggi dihasilkan Kabupaten Palalawan dengan deviasi standar 82,25 % dari rata-rata. Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

### **4.3. Belanja Modal**

Rata-rata jumlah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra sebesar 304,4 % dengan jumlah terendah 1,23 % merupakan nilai terendah Kabupaten 48 Kepulauan Mentawai sedangkan tertinggi 5,22 % dihasilkan kabupaten Humbang HasudutanHumbang Hasudutan dengan deviasi standar 74,60 % dari rata-rata. Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

### **4.4. Analisis Data**

Setelah diuji melalui Program SPSS 18.00 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

---

Y	=	1,476	+	0.166	X1	+	0.319	X2
SE	=	0,319		0,067				0.087
t	=	4,629		2,477				3,651
F	=	12.401						
R2	=	0.175						
DW	=	1,652						

#### 4.5. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik yang merupakan dasar dalam regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang meliputi:

Uji normalitas dan transformasi data. Setelah itu dilakukan pengujian tentang tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya autokorelasi dan tidak adanya heterokedastisitas. Dilihat dari nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dapat diketahui bahwa tidak adanya multikolinearitas antara variabel bebasnya. Dilihat dari besarnya DW = 1,652, pada tingkat  $\alpha = 0,05$   $k = 3$   $n = 120$ , nilai  $d_l$  1,760 adalah dan nilai  $d_u$  adalah 1,706 maka  $4 - d_u = 4 - 1,706 =$  dan  $4 - 1,706$  adalah Karena nilai  $d = 1,652$  berada diantara nilai  $d_u$  dan  $4 - d_u$ , maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis yang terdapat pada lampiran ternyata tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas karena hasil regresi absolut residual dengan variabel bebasnya, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.6. Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap PDRB

Berdasarkan hasil uji regresi pada lampiran, untuk mengetahui pengaruh secara bersama dan secara individu PAD dan Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra tahun 2009 – 2012 akan dilakukan pengujian sebagai berikut :

##### Uji Statistik ( F )

Hasil pengujian ini menunjukkan nilai uji F untuk data sampel diperoleh sebesar Fhitung sebesar 12,401 sedangkan pada tingkat kepercayaan 95% (  $\alpha = 0,05$  ) adalah 3,09 dengan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian berarti bahwa nilai Fhitung  $> F_{tabel}$  ( 12,401  $>$  3,09) maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak sama dengan nol. Karena signifikansi kurang dari 5%, dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif secara

simultan dari variabel PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra dapat ditolak (  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_a$  diterima ).

### **Uji Parsial**

Setelah dianalisis menggunakan SPSS seperti terdapat pada lampiran, maka hasil uji parsial dapat dilihat bahwa t-hitung untuk PAD 2,477 lebih besar dari t-tabel 1.660 dan signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Berarti berpengaruh positif, dengan koefisien regresi 0,186 maka  $H_{A1}$  tidak ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sedangkan Belanja Modal t hitung 3.651 lebih besar dari t-tabel 1.660 dan signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti berpengaruh positif, dengan koefisien regresi 0,319. Dengan demikian menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- (1). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini adalah relatif kecil yaitu sebesar 0,166 . Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan informasi penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- ( 2 ). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. Besarnya Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi juga kecil yaitu 0,319. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk lebih meningkatkan belanja pemerintah terutama dalam belanja modal..

## **5.2. Saran**

Sehubungan dengan keterbatasan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- ( 1). Populasi penelitian hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra , hasilnya belum dapat mewakili Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Sebaiknya penelitian mendatang bisa dikembangkan lagi menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra dan dengan menambah periode pengamatan yang lebih panjang.
- ( 2) Penelitian selanjutnya meneliti bagaimana perbedaan sebelum dan setelah adanya regulasi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ( 3 ) Dalam penelitian ini belum memberikan secara rinci alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal mana yang lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi,Priyo Hari. 2006 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah ( Sudi Pada Kabupaten dan Kota SeJawa – Bali ) .*Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.*
- Ardi Hamzah, Pengaruh Belanja Modal PAD DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomoi Kemiskinan dan Pengangguran .*Simposium Akuntansidan Keuangan Sektor Publik Pertama Paska Sarjana UPN Veteran Surabaya, 2007*
- Bps.Provinsi/kabupaten.go.id..
- Bpslam.go.id..
- Boediono, 1988 *Pengantar Ilmu Ekonomi No.4 BPFE .Yogyakarta*
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE
- BAPPENAS, 2003 *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah.*Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah.Jakarta.
- Ghozali Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.*
- Halim,Abdul,(2008). *Manajemen Keuangan Daerah ( Bunga Rampai )* ,Yogyakarta Penerbit UPP AMP YKPN ,2001
- Hamzah, Pengaruh Belanja dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan pengangguran .*Simposium Akuntansi dan keuangan Sektor Publik Pertama Paska Sarjana UPN Veteran Surabaya, 2007*
- Ihyaul Ulum M.D. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Jhingan, MI. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, edisi pertama Jakarta Penerbit Erlangga, 2004*

Jamzani Sodik, 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No.1*, April 2007 Hal 27- 29.

Lampung Dalam, Angka(2011), *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu.2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Developmen and Cultural Change*, Chicago.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Mardiasmo, 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011*.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Samuelson, Paul.2004 *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17 ( terjemahan ) Penerbit Media Global Edukasi, Jakarta*.

Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus.2005. *Economic. Eighteenth Edition. International Edition* .Singapura : McGraw – Hill Book Co.

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2011 .

Saragih, Jan Waner, 2006 *Analisis Pengaruh Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Tesis tidak dipublikasikan Magister Ekonomi Pembangunan USU, Medan*

Simanjuntak, Daslan, 2007. *Analisis Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis Tidak Dipublikasikan, Megister Ekonomi Pembangunan USU, Medan*.

Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Pendekatan Analisis Jalur*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 4 Nomor 2 Desember 2007*.

Ulfi Maryati, Endrawati, 2007 *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.2 Desember 2010 ISSN 1858 -3687 hal 68-84*.

\_\_\_\_\_, **undang-undang No.28/2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

\_\_\_\_\_, **undang-undang No.32/2004, Tentang Pemerintah Daerah**

\_\_\_\_\_, **undang-undang No.33/2004, Tentang Perimbangan keuangan antara**

**Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah**

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

**LAMPIRAN**

**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRTPA D SQRTPM	,947	1,056

a. Dependent Variable: SQRTPDRB

Sumber : Data diolah :2013

**Hasil Pengujian Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,136 <sup>a</sup>	7,159	2	91	,001	1,570

a. Predictors: (Constant), SQRTPM, SQRTPAD

b. Dependent Variable: SQRTPDRB

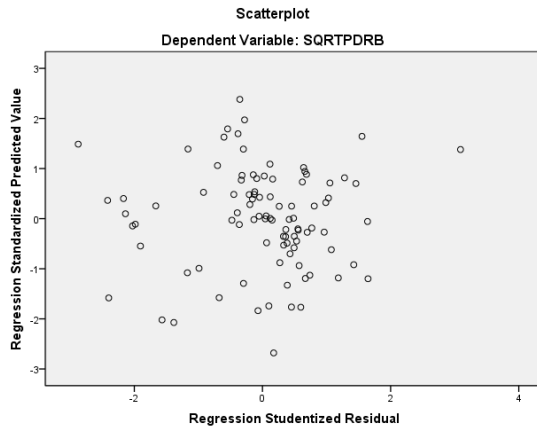
Sumber : Data diolah :2013

**Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$1 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$1.612 < 1.570 < 4 - 1.703$

Sumber : Data diolah :2013

### Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



### Hasil Uji F

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1862,255	2	931,128	7,159	,001 <sup>a</sup>
	Residual	11835,353	91	130,059		
	Total	13697,609	93			

a. Predictors: (Constant), SQRTBM, SQRTPAD

b. Dependent Variable: SQRTPDRB

Sumber : Data diolah :2013

### Uji Parsial ( uji t )

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31,761	3,186		9,970	,000
SQRTPAD	,173	,049	,353	3,529	,001
SQRTBM	,094	,044	,214	2,141	,035

a. Dependent Variable: SQRTPDRB

Sumber : Data diolah :2013